



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Selasa, 16 September 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA					
FORMULIR BERITA				Register No :	
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT		
DARI : MENTERI DALAM NEGERI UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI					
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 500.2.3/5049/SJ DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH DAN PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR <i>ONLINE</i> PD HARI SELASA TGL 16 SEPTEMBER 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI <i>ZOOM MEETING</i> DGN <i>MEETING ID 677 057 3756</i> <i>PASSWORD INFLASI KMA</i> DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL <i>YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA</i> YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH SERTA PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TTK KMA CC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR <i>ONLINE</i> BERSAMA FORKOPIMDA PROV KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR <i>ONLINE</i> BERSAMA FORKOPIMDA KAB GARING KOTA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI <i>DRESS CODE</i> PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA DD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA EE TTK DUM TTK HBS					
TANGGAL PEMBUATAN 15 September 2025					
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Tomsy Tohir		Terima	Kirim		
Tanda Tangan					

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi (via zoom)

Hari/Tanggal : Selasa / 16 September 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Firdausy	by Eko & SDA		1
2	Eddy Rohme	ISPS		2
3	Eddy Sun	by Eko		3
4	Dian Yudha	by Eko & SDA		4
5	PITRA KHAIIRANI	KEC. L. ANGGAN P		5
6	Krisman	Diskominfo		6
7	FITRYANI	DISDAK	L	7
8	Ahmad Fajar	DISPERKIN	L	8
9	Solihin	Dislop	L	9
10	Arief R.H	BPKAD	L	10
11	Indra Azhari	Perekonomian		11
12	M. Fachleq	PRP 3		12
13	Junaidi	Inspektat		13
14	Isnani. zain	Bappeida		14
15	Mawardi	Bach Umum		15
16	Syaminat			16
17	Mina	Eko & SDA		17
18	Enoch	Eko & SDA		18
19	Fabriz	Eko & SDA		19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/5049/SJ Tanggal 15 September 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Selasa, 16 September 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Srikandi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Fokus pada upaya pengendalian untuk menurunkan harga beras di 100 Kab/Kota melalui penyaluran beras SPHP secara masif serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk optimalisasi penyaluran beras SPHP.
 - b) Akan diberlakukan relaksasi dalam implementasi aplikasi klik SPHP di pasar rakyat sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemesanan dengan memfasilitasi petugas untuk membantu di pasar.
 - c) Melaksanakan GPM secara masif di wilayah masing-masing selain itu juga mengadakan di kecamatan, sekolah-sekolah di pabrik-pabrik garmen dan lokasi lainnya.
 - d) Optimalisasi penyaluran beras SPHP melalui KDKMP dan POLDA.
 - e) Menjadikan bumdes sebagai RPK/Kios pangan untuk dapat mendorong penyaluran beras SPHP.
 - f) Realisasi searap gula petani 49.983 ton yang terdiri dari IDFOOD Group = 21.500 ton, PT SGN = 6.897 ton dan pedagang = 21.586 ton, sehingga sisa belum terserap 31.996 ton.
 - g) Rata-rata harga jagung pipil kering (JPK) di tingkat petani per tanggal 12 Sep 2025 sebesar Rp.5.499/kg dan di tingkat peternak sebesar Rp.6.614/kg.
 - h) Stimulus ekonomi TW II tahun 2025 memutuskan penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu paket kebijakan untuk penyaluran bantuan sosial.
 - i) Pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah selama 2 bulan (Oktober-November 2025)
 2. **BADAN PUSAT STATISTIK**
 - a) Pada M2 September 2025, tercatat 13 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 2 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 13 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah dan daging ayam ras.
 - b) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M2 September 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- c) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Takalar dengan nilai perubahan IPH 3,26%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai merah dan beras

3. BULOG

- a) Realisasi pengadaan GKP sebesar 4,2 juta ton GKP dan realisasi beras sebesar 745 ribu ton, jadi total pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 2.993.754 ton.
- b) Pengadaan gabah pada periode ini mencapai 75% dari total realisasi pengadaan beras. Tingginya proporsi pengadaan gabah ini mencerminkan fokus strategis BULOG dalam mendukung petani secara langsung.
- c) Program SPHP dilaksanakan kembali mulai bulan Juli hingga Desember 2025 dengan total pagu sebesar 1,5 juta ton. Rata-rata penyaluran SPHP per hadri mencapai 2.000 s.d 9.000 ton
- d) Tantangan pelaksanaan SPHP 2025 yaitu setok dan preferensi konsumen (pulen atau pera). Serta biaya distribusi beras SPHP di daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal) serta wilayah sulit lainnya relatif tinggi akibat tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi yang terbatas,
- e) Pemerintah melalui Perum BULOG bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, Pemerintah Daerah serta sejumlah BUMN pangan bersinergi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia dengan menyalurkan lebih dari 20 ribu ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

4. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Kejaksaan memiliki peran strategis melalui fungsi jaksa pengacara negara dalam memberikan pendampingan hukum terhadap kebijakan pengendalian inflasi.
- b) Program percepatan pembangunan 3 (tiga) juta rumah merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan pengendalian inflasi di sektor perumahan
- c) Peta jalan pembangunan kependudukan merupakan fondasi penting perencanaan pembangunan yang berdampak pada kebutuhan pangan, energi dan perumahan yang memerlukan akurasi data dan koordinasi antar instansi.
- d) Rekomendasi dari Jamdatun terhadap Pemerintah Daerah:
 - Memperkuat koordinasi antara kejaksaan, pemerintah daerah dan TPID guna memastikan kebijakan pengendalian inflasi berbasis data kependudukan yang valid dan akuntabel.
 - Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program 3 juta rumah dan peta jalan pembangunan kependudukan, terutama untuk mengatasi hambatan hukum, sengketa lahan serta potensi maladministrasi.
 - Perlunya meningkatkan mekanisme pengawasan terpadu serta penerangan/penyuluhan hukum untuk mencegah penyalahgunaan izin, penyimpangan anggaran dan memastikan program tepat sasaran, transparan dan berkelanjutan.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

5. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Rata-rata harga minyak goreng pada minggu kedua September 2025 dibandingkan bulan sebelumnya yaitu kemasan premium (tidak diregulasi) Rp.22.360/liter (-0,07%) dan minyakita Rp.16.676/liter (-0,41%).
- b) Harga minyak goreng kemasan tercatat stabil dan dapat ditahan dengan adanya minyakita.
- c) Pergerakan harga nasional minyakita dipengaruhi adanya fluktuasi harga di beberapa wilayah antara lain wilayah timur dan wilayah lainnya, dimana perlu dukungan komitmen dan konsistensi pasokan dari produsen – BUMN ke pasar rakyat.
- d) Realisasi DMO bulan Agustus sebesar 194.060 ton dan per 15 September sudah terealisasi 61.492 ton seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

6. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- b) Strategi operasional peningkatan produksi padi:
 - Melakukan pengawalan dan pendampingan penanaman padi di seluruh areal sawah mulai dari bulan Mei 2025 dst.
 - Mengoptimalkan kinerja pompanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan khususnya pada areal sawah tadah hujan di wilayah masing-masing.
 - Seluruh bantuan APBN untuk pompa air, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan agar digunakan untuk kegiatan penanaman padi di wilayah masing-masing
 - Melakukan pengawalan dan pendampingan percepatan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah rakyat bagi daerah yang mendapat kegiatan dimaksud sekaligus mengawal percepatan tanamnya di wilayah masing-masing.
 - Percepat tanam sehingga jarak panen ke tanam maks 14 hari meingkatkan indek pertanaman dan provitas.
 - Mekanisasi panen dan pasca panen sehingga menurunkan losis dibawah 5%.
 - Memperlancar penyerapan gabah petani sehingga harga gabah stabil diatas Rp.6.500/kg.
- c) Rekomendasi kebijakan peningkatan produksi dan pengendalian inflasi cabai dan bawang merah:
 - Meningkatkan luas tanam cabai dan bawang merah secara mandiri baik melalui alokasi APBD ataupun memanfaatkan Dana Desa (20% untuk ketahanan pangan) dan sumber- sumber dana lainnya (CSR Perusahaan dsb) dengan memperhatikan kebutuhan bulanan, ketersediaan lahan, kesesuaian agroklimat, musim tanam, teknologi budidaya, penanganan pascapanen hingga pemasaran
 - Melakukan Kerjasama Antara Daerah (KAD) melibatkan para Champion berupa kerjasama pemenuhan pasokan dan/atau pendampingan teknis budidaya
 - Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana produksi benih dan tanaman yang sudah diberikan melalui fasilitasi APBN dan DAK Fisik seperti Nurseri, Screen house, GH sederhana dll untuk memproduksi benih semai dan pertanaman cabai dan bawang merah
 - Mendorong Kelompok-Kelompok P2L yang pernah diberikan bantuan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

melalui APBN dan DAK Non Fisik untuk terus melakukan pertanaman cabai dipekarangan dan demplot masing-masing

d) Strategi operasional peternakan:

- Menyiapkan data terkait rencana produksi, harga Komoditas Peternakan, harga Saproinak (pakan) DOC secara rutin dan terupdate dalam upaya monitoring kondisi harga di daerah sentra peternakan;
- Memberikan data dan informasi untuk wilayah yang mengalami surplus sesuai prognosa produksi, sehingga upaya intervensi distribusi penyaluran daging ayam dan/atau telur konsumsi akan lebih tepat sasaran yaitu ditujukan ke wilayah defisit atau harga yang tinggi;
- Bersama Bapanas dan K/L terkait dalam hal penetapan kebijakan penyerapan live bird dan/atau telur konsumsi yang mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) tingkat produsen/konsumen yang mengacu biaya produksi agar peternak memperoleh keuntungan yang wajar;
- Bersama Bapanas dan K/L lain berupaya mengeluarkan kebijakan terkait upaya penyerapan dengan menugaskan BUMN Pangan sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil kembali;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain bersama Bapanas, Kemendag, BUMN Pangan dan Satgas Pangan Dinas Pangan Provinsi serta stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan live bird dan/atau telur konsumsi di tingkat produsen dan asosiasi koperasi/pelaku usaha; dan
- Penyiapan infrastruktur di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Air Blast Freezer (ABF) & Cold Storage.
- Melakukan upaya pengendalian harga daging dengan pemantauan harga di kota kota besar di Indonesia.
- Melakukan analisis supply demand terhadap wilayah-wilayah sentra ternak (produsen) sebagai wilayah pensupply ternak.
- Kegiatan optimalisasi reproduksi (IB) agar tetap dilaksanakan di semua provinsi tanpa dukungan anggaran APBN untuk meningkatkan kelahiran ternak.

7. KANTOR STAF PRESIDEN

a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 12 September 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	-	Daging Sapi, Kedelai	Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras
	Waspada	-	Gula Pasir Curah	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Telur Ayam Ras
	Tidak Aman	-	-	Beras Medium (Zona 3), Bawang Merah, Bawang Putih, Minyakita, Jagung Tk Peternak

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 12 September 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	9	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Yahukimo	9	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Intan Jaya	7	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Pegunungan Bintang	6	Bawang Merah, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mapij	6	Beras Medium, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Paniai	4	Bawang Merah, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Dogiyai	4	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah
Kab. Lanny Jaya	3	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Deiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Ialuhaha Timur	2	Beras Medium, Jagung 1k Polternak
Kab. Asmat	2	Cabai Merah Kenting, Cabai Rawit Merah
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Waropen	2	Minyakita, Kedelai
Kab. Merauke	2	Telur Ayam Ras, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung 1k Polternak
Kab. Sorong	2	Kedelai, Jagung 1k Polternak
Kab. Karimun	2	Jagung 1k Polternak, Daging Sapi

8. KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN & PEMBANGUNAN KELUARGA

Tata kelola kependudukan menuju negara maju:

- Seluruh penduduk harus menempuh wajib belajar 12 tahun
- Seluruh penduduk harus memiliki keterampilan/kompetensi profesi
- Seluruh penduduk harus memiliki pekerjaan (sebagai job creator maupun job seeker)
- Tersedia investasi dan lapangan pekerjaan yang mencukupi
- Seluruh penduduk harus berkontribusi terhadap pajak penghasilan.

9. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR). KEMENDAGRI dan KEMENPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.
- Pemerintah daerah wajib ikut serta menyukseskan program 3 juta rumah sebagai PSN (Pasal 67 UU No.23 tahun 2014).
- Bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan, akan menerima sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali hingga penonaktifan sementara hingga pemberhentian kepala daerah. (Pasal 68 UU No.23 Tahun 2014)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
- Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
- Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
- Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
- Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
- Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

10. SATGAS PANGAN POLRI

- a) Upaya Satgas Pangan Polri dalam pengendalian inflasi:
 - Berkoordinasi dengan seluruh dirkrimsus jajaran (kasatgasda) terkait perkembangan beras nasional.
 - Satgasda melakukan pengecekan dari hulu hingga hilir.
 - Program menjaga stabilitas, ketersediaan dan intervensi harga melalui penyaluran beras SPHP oleh seluruh jajaran baik ditingkat mabes, polda, polres hingga polsek.
- b) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu:
 - memperkuat pengawasan distribusi dan penyaluran beras bantuan pangan, beras SPHP, minyakita dan gula dengan melibatkan K/L, pemerintah daerah dan satuan wilayah. Guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga di tingkat masyarakat serta menjamin ketepatan sasaran dalam pendistribusiannya.
 - Satgasda bersama-sama dengan BULOG dan pemerintah terus meningkatkan kegiatan GPM.
 - Satgasda bersama-sama instansi terkait untuk turun langsung mengecek dan melakukan penyelidikan terkait info rembesan gula rafinasi di pasar dan lakukan tindak tegas bila menemukan penyimpangan.

11. KEMENTRIAN DALAM NEGERI

- a) Atensi 10 Pemda dengan IPH tertinggi/terendah pada minggu II September dibandingkan minggu I September 2025

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)		KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (KENAIKAN PADA MINGGU II SEPTEMBER 2025)	KETERANGAN
	MINGGU I SEPTEMBER	MINGGU II SEPTEMBER		
KAB. TAPANULI TENGAH	3.07	5.96	CABAI MERAH, MINYAK GORENG, BAWANG PUTIH	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. LIMA PULUH KOTA	2.72	5.87	CABAI MERAH, BERAS, DAGING AYAM RAS	Telah Melaporkan 1 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KOTA PADANG PANJANG	3.57	5.25	CABAI MERAH, BERAS, MINYAK GORENG	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. AGAM	3.56	5.13	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, CABAI RAWIT	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. MANDAILING NATAL	3.66	4.81	CABAI MERAH, JERUK, DAGING AYAM RAS	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. TAPANULI UTARA	4.43	4.76	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, TELUR AYAM RAS	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KOTA TEBING TINGGI	3.25	4.44	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, DAGING AYAM RAS	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. SOLOK SELATAN	2.6	4.38	CABAI MERAH, BERAS, JERUK	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. ASAHAN	3.13	4.2	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, SUSU BUBUK	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KOTA PARAMAN	2.51	4.09	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, MINYAK GORENG	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)		KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (PENURUNAN PADA MINGGU II SEPTEMBER 2025)
	MINGGU I SEPTEMBER	MINGGU II SEPTEMBER	
KAB. WAKATOBI	-3.5	-4.2	BERAS, CABAI RAWIT, CABAI MERAH
KAB. BOLAANG MONGGONDOW TIMUR	-4.18	-4.07	CABAI MERAH, BERAS, BAWANG MERAH
KAB. TAPANULI SELATAN	-6.64	-4	BERAS, BAWANG MERAH, DAGING AYAM RAS
KAB. TORAJA UTARA	-2.78	-3.26	BERAS, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH
KAB. KUTAI TIMUR	-2.84	-3.09	BERAS, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT
KAB. KONAWE KEPULAUAN	-2.34	-2.88	BERAS, IKAN KEHBUNGIKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOL/ IKAN ASO-ASO, SUSU BUBUK UNTUK BALITA
KOTA TOMOHON	-3.18	-2.55	BAWANG MERAH, BERAS, CABAI RAWIT
KAB. BOLAANG MONGGONDOW UTARA	-2.72	-2.5	BAWANG MERAH, DAGING SAPI, CABAI MERAH
KAB. LUWU	-1.7	-2.41	BERAS, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH
KAB. BUTON UTARA	-2.24	-2.35	CABAI RAWIT, DAGING AYAM RAS, BERAS

Sumber: Hasil Money drolah Tim, September 2025

www.kemendagri.go.id | @kemendagri

6

- b) Arahan dan penekanan dari Mendagri:
 - Secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi atau anev pengendalian inflasi daerah
 - Memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan pengecekan ke lapangan/pasar.
 - Perlu merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga.
 - Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan BTT.
 - Melakukan langkah yang lebih proaktif, konkrit dan cepat

12. TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d September 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, serbuan teritorial, operasi teritorial dan pendampingan petani maupun Kementan

- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI sudah bangun 6 kodam, 10 brigif TP, 55 BTP dan kompi produksi ketahanan pangan
- e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk monitor serta bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-2 September 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar -0,37 (deflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Merah (-0,8568), Beras (-0,2252), dan Telur Ayam Ras (-0,1219). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (16 September 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru